



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025

SAMBUTAN ANGGOTA VI BPK

Drs. H. Fathan Subchi, MAP, CIISA, ChFA, CSFA, QIA, CFrA

Bali, 12 Februari 2026





AGENDA

Dasar Hukum Pemeriksaan

Tujuan Pemeriksaan

Fokus Pemeriksaan

Harapan terhadap SIPD RI

Pengelolaan Kas secara Efektif

Implementasi PSAP yang baru

Pemberlakuan Perpres No. 72/2025

Perkembangan Opini LKPD

Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan Tematik Semester II 2025

Perkembangan Penyelesaian TLRHP

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Harapan dan Komitmen

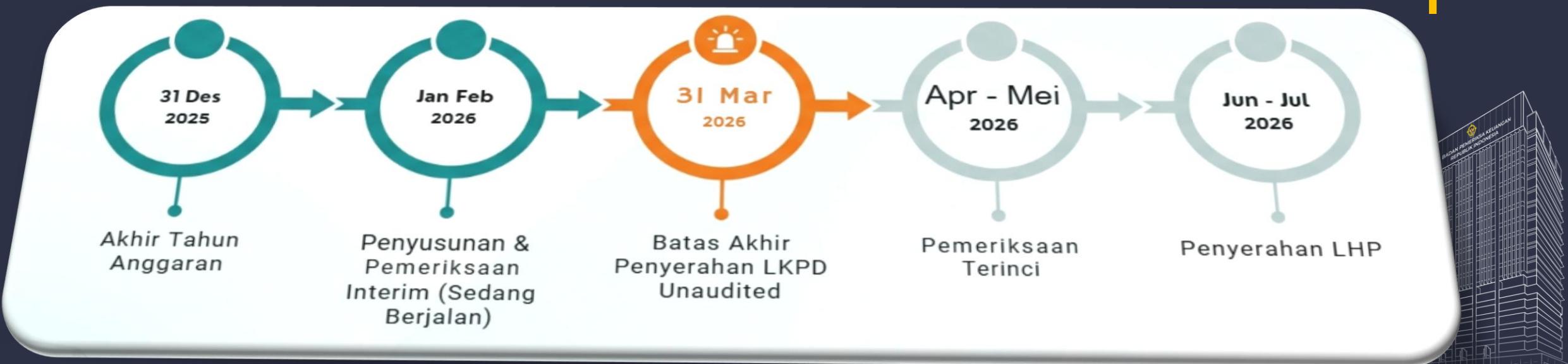


Dasar Hukum Pemeriksaan & Jangka Waktu Penyerahan LKPD



Dasar Hukum

- UU No. 17 Tahun 2003: Pasal 30 & 31
- UU No. 1 Tahun 2004: Pasal 55 & 56





Standar Pemeriksaan Keuangan Negara



**Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017
tentang SPKN, Lampiran II Pernyataan
Standar Pemeriksaan 100, Standar Umum
angka 25 tentang komunikasi pemeriksaan
yang menyebutkan bahwa:**

“Pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan Efektif di seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan/atau pemangku kepentingan terkait.”



Tujuan & Kriteria Pemeriksaan

Fokus Pengungkapan Khusus 2025

- ❖ Indikator Makro (Pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan, Inflasi)
- ❖ Mandatory Spending (Pendidikan, Infrastruktur, Transfer)
- ❖ Pemanfaatan Dana Otsus



1. Kesesuaian

Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan



2. Pengungkapan

Kecukupan pengungkapan (Full Disclosure)



3. Kepatuhan

Terhadap peraturan perundang-undangan



4. SPI - Efektivitas Sistem Pengendalian Intern





Fokus Pemeriksaan Berdasarkan *Risk Based Audit*

Belanja (Expenditure)

- Bansos & Belanja Tak Terduga (BTT)
- Hibah Barang & Jasa Diserahkan ke Masyarakat
- Pembayaran mendahului penetapan APBD

Aset & Modal

- Belanja Modal
- Pelunasan Utang Belanja
- Migrasi Aset Tetap ke e-BMD

Pendapatan & Kas

- Akun Pendapatan Daerah Signifikan
- Kas & Dana Bantuan Pihak Ketiga Belum disahkan BUD

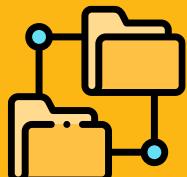


HARAPAN TERHADAP SIPD



Pemanfaatan fitur SIPD RI secara penuh

- Perencanaan
- Penganggaran
- Akuntansi
- Pelaporan



Interoperabilitas antar Aplikasi dari
Kementerian/Lembaga

Integrasi probis BMD, BUMD dan BLUD



Dampak terhadap penyajian laporan keuangan dan
kesesuaian data antar aplikasi satu dengan yang lainnya





Ekosistem Digital

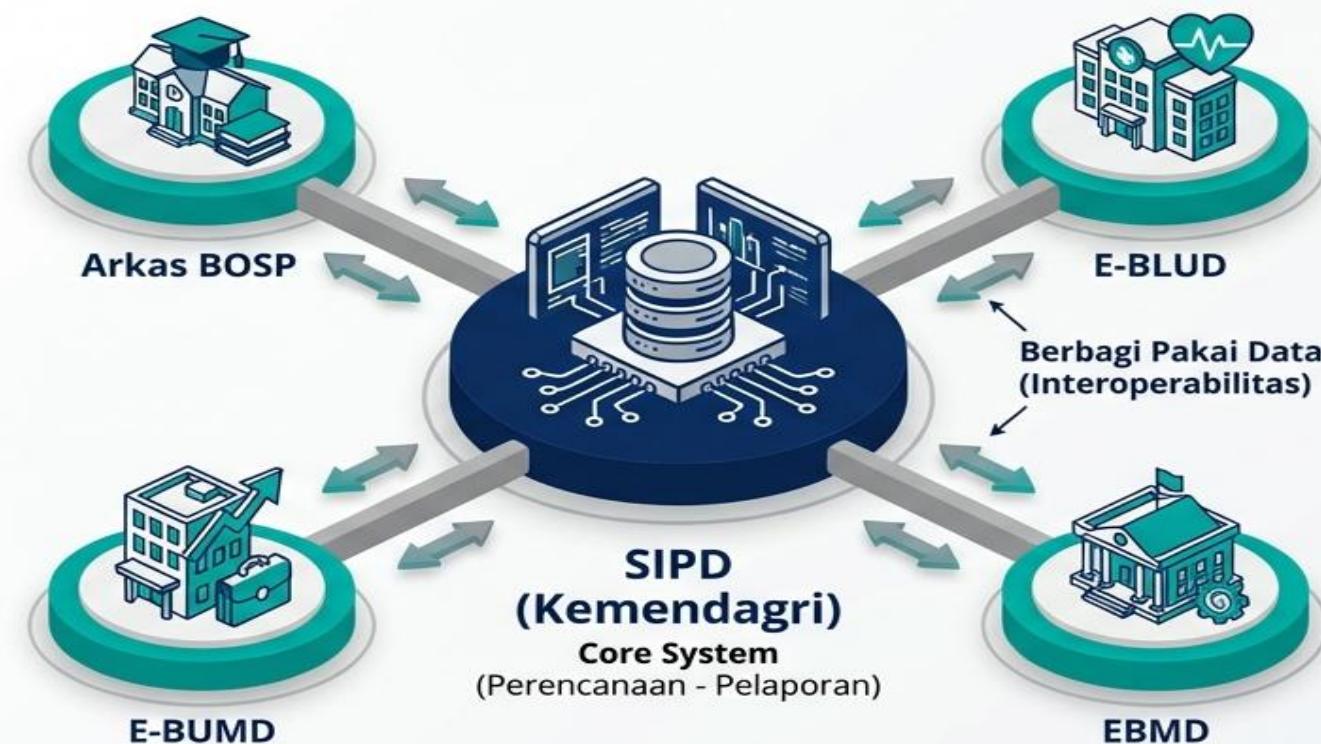
Transformasi Manajemen Kas Daerah: Integrasi Ekosistem Digital Melalui SIPD

Dari Perencanaan hingga Audit: Sinergi Data Keuangan Pemda, Sekolah, dan Badan Usaha



Implementasi Penuh (2022 – Sekarang)

Aplikasi SIPD telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2022. Saat ini, sebagian besar Pemda telah menerapkan SIPD secara penuh sebagai tulang punggung manajemen keuangan, meliputi tahap perencanaan, penganggaran, akuntansi, hingga pelaporan.



Dampak pada Laporan & Audit BPK

Integrasi ini meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan Pemda. Pemeriksaan BPK kini difokuskan pada analisis dampak transaksi antar entitas dan memastikan kesesuaian data antara aplikasi pendukung (seperti Arkas/E-BLUD) dengan sistem utama SIPD.



Transformasi Manajemen Kas Pemerintah

Menuju Prinsip Cost-Effective

Peralihan paradigma menuju penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat untuk menjamin efisiensi dan ketersediaan likuiditas.



THE FOUNDATION

LANDASAN HUKUM

Mandat UU No. 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara

Pemerintah wajib mengatur prinsip-prinsip yang selama ini belum mendapatkan perhatian memadai, mencakup:

- ✓ Pelaksanaan fungsi pengelolaan kas.
- ✓ Perencanaan penerimaan dan pengeluaran.
- ✓ Pengelolaan utang piutang dan investasi.
- ✓ Optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah.



THE EXECUTION

IMPLEMENTASI OPERASIONAL

Amanat PP No. 39 Tahun 2007: Pengelolaan Uang Negara/Daerah

Pelaksanaan APBD sangat bergantung pada siklus arus kas. Perencanaan yang buruk menghambat eksekusi.

TUJUAN UTAMA: Memberikan **kepastian dana** di kas daerah.

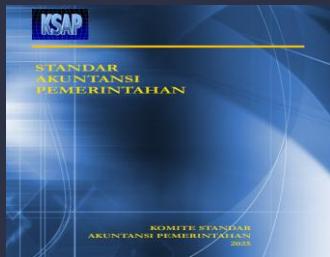
DAMPAK:

Membayai belanja sesuai dengan **nilai dan jadwal kegiatan** yang telah direncanakan.

Manajemen kas yang efektif bukan sekadar administrasi, melainkan strategi untuk memastikan likuiditas tersedia tepat waktu.



IMPLEMENTASI PERATURAN TERBARU DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam dua tahun terakhir telah menerbitkan tiga PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Berbasis Akrual yang baru yaitu:

1. PSAP 18 tentang Pendapatan atas Transaksi Nonpertukaran,
2. PSAP 19 tentang Pengaturan Bersama, dan
3. PSAP 20 tentang Agrikultur.



Perpres No. 72/2025

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional

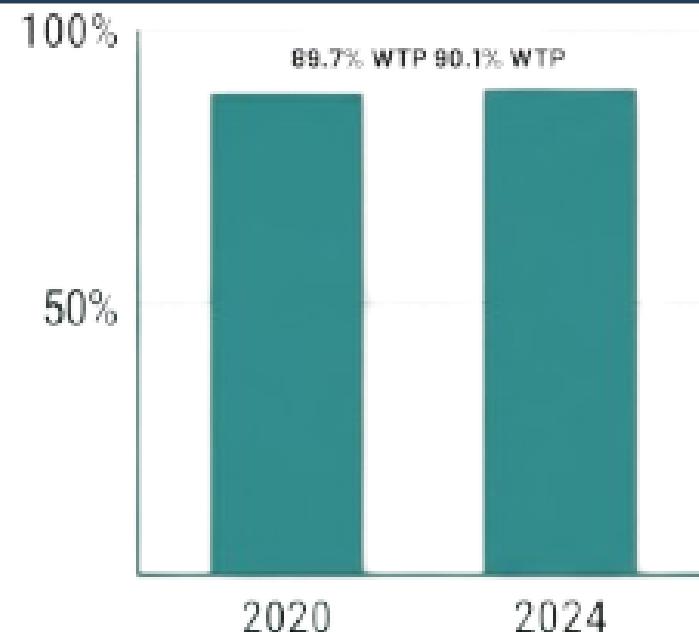
Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta pertanggungjawaban keuangan.

Perlu dipastikan dampak dari peraturan baru tersebut terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah





Perkembangan Opini LKPD



PERHATIAN: Reality Check

- Jumlah absolut Pemda WTP turun.
2023: 493 Pemda → 2024: 491 Pemda
- 55 LKPD Non-WTP (22 di antaranya tidak pernah WTP > 3 tahun).

Pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara ekonomis, efisien, dan efektif agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat





Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN TEMATIK



SEMESTER II TAHUN 2025

DJPKN
Siner6i
SIGAP, ENERGIK & INOVATIF





Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan

Neraca Pangan Tidak Valid

Data stok dan konsumsi tidak akurat. Akibatnya, *early warning system* dan kebijakan stabilisasi harga tidak tepat sasaran.

Alih Fungsi Lahan (LP2B)

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum terintegrasi dengan RTRW. Risiko penurunan produktivitas pangan jangka panjang.





Pemeriksaan Tematik Pelayanan JKN di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) dan Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK)



SDM Kesehatan belum
memenuhi standar di
FKTP



Keterbatasan Alkes &
Infrastruktur
Pendukung



Pengelolaan Obat &
BMHP belum memadai



Pemanfaatan Dana
Kapitalis belum optimal





Pemeriksaan Tematik Data Pokok Pendidikan

- 
- Pengumpulan dan pemutakhiran Dapodik belum dilaksanakan secara memadai. Hal ini disebabkan Kepala Satuan Pendidikan belum melaksanakan pemutakhiran data secara berkala sesuai kondisi riil sehingga mengakibatkan data peserta didik, PTK serta prasarana pada Dapodik belum sepenuhnya valid;
 - Dapodik belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan di bidang pendidikan seperti pemberian bantuan pendidikan, pemerataan guru, dan pembangunan prasarana. Hal ini disebabkan Dinas Pendidikan belum memiliki pedoman pemanfaatan Dapodik, sehingga mengakibatkan implementasi kebijakan pembangunan di bidang pendidikan belum sepenuhnya tepat sasaran.



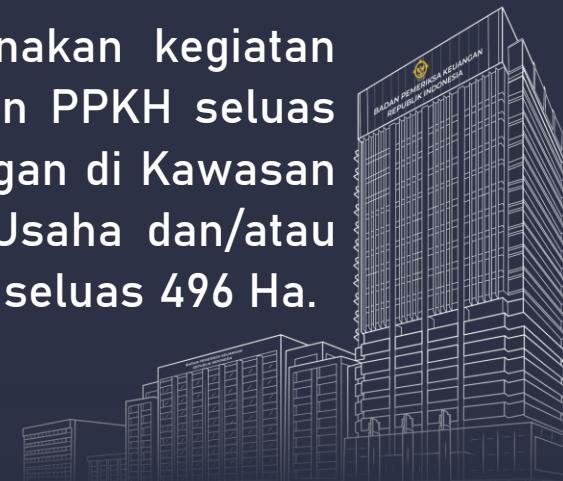


Pemeriksaan Tematik Pengelolaan Lingkungan pada Usaha Pertambangan



Kepatuhan
pengelolaan
lingkungan pada usaha
pertambangan.

- Pelanggaran di Bidang Lingkungan Hidup, antara lain, Membuang air limbah melampaui baku mutu dan di luar titik pembuangan yang ditetapkan; Tidak memiliki IPAL atau memiliki IPAL tidak sesuai IPPLH atau Pertek; Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan tanpa Izin di luar kawasan hutan seluas 1.787 Ha; dan, Pemegang IUP habis masa berlaku belum memulihkan fungsi lingkungan pada area bekas tambang seluas 6.561 Ha.
- Pelanggaran di Bidang Kehutanan, yaitu Melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di Kawasan Hutan di Luar Izin PPKH seluas 1.062 Ha; Melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di Kawasan Hutan tidak memiliki PPKH seluas 9.063 Ha; dan Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan tanpa Izin di kawasan hutan seluas 496 Ha.





Pemeriksaan Tematik Kinerja BPD

Keamanan Siber



Perlu penguatan Incident Response & Fraud Detection System (FDS). Risiko kerugian kerugian finansial material.

Profitabilitas & Kredit



- Ketergantungan pada dana mahal (Deposan). Perlu strategi dana murah (CASA) dan perbaikan analisis kredit.





Pemeriksaan Tematik Pajak dan Retribusi Daerah



Optimalisasi PAD
melalui kepatuhan
pengelolaan Pajak
Daerah.

- Pemerintah daerah belum memiliki database Pajak Alat Berat.
- Permasalahan Penetapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yaitu perbedaan tarif antara yang dikenakan Pihak Pemungut (mengikuti ketentuan Kementerian ESDM yaitu 5%) dan tarif yang tercantum dalam Perda (7,5%-10%).



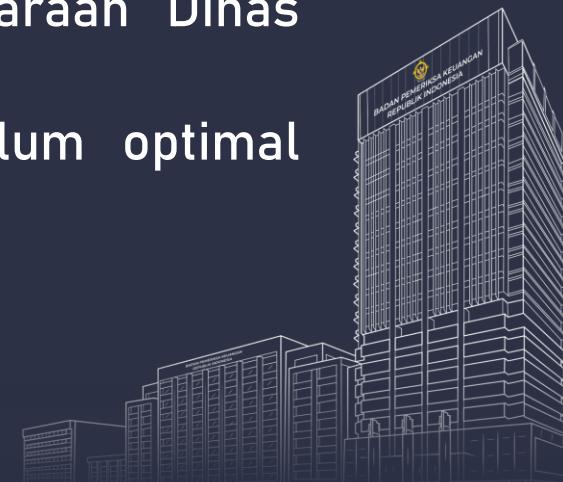


Pemeriksaan Tematik Manajemen Aset



Efektivitas
pengamanan dan
pemanfaatan aset
daerah.

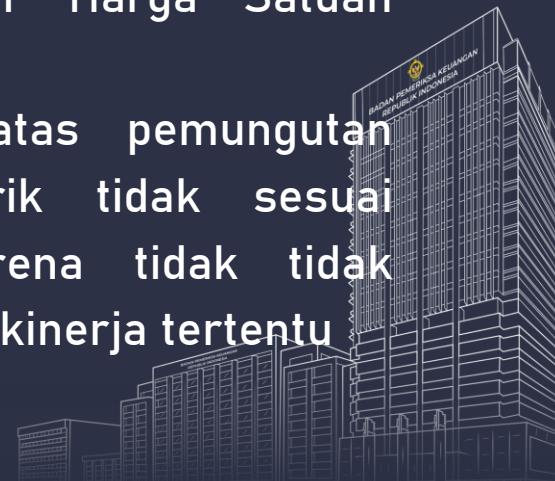
- Digitalisasi Inventarisasi BMD belum mendukung digitalisasi penatausahaan BMD yaitu tidak ada info lokasi, dokumen sumber, serta hasil inventarisasi belum ditindaklanjuti dengan *update* data pada aplikasi;
- Masih terdapat permasalahan pengamanan Fisik BMD antara lain Pengamanan Fisik Tanah, Pengamanan Fisik Gedung dan Bangunan dan serta Pengamanan Fisik Kendaraan Dinas belum memadai;
- Pemanfaatan aset daerah oleh pihak lain belum optimal meningkatkan PAD.





Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja

- Kelebihan pembayaran
- Kekurangan volume pekerjaan
- Denda keterlambatan belum dikenakan
- Bukti pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan kenyataannya
- Pelaksanaan/pertanggungjawaban Belanja Hibah tidak sesuai ketentuan
- Pertanggungjawaban realisasi belanja pemeliharaan melewati tahun anggaran yang berakibat tidak tercatatnya utang
- Pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tidak sesuai ketentuan
- Pelaksanaan pengadaan *e-purchasing* katalog elektronik melalui metode mini kompetisi tidak sesuai ketentuan.
- Kontrak dilakukan sebelum anggarannya tersedia dalam APBD
- Standar harga satuan biaya perjalanan dinas melebihi Standar Harga Satuan Regional
- Pembayaran insentif atas pemungutan PPJ/PBJT-Tenaga Listrik tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak disertai dengan prestasi kinerja tertentu





Penyelesaian **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)**



Total Rekomendasi: 296.250
Nilai: Rp30,20 Triliun
Lingkup: 263 Pemda di Ditjen PKN VI

Status: 212 Pemda
Telah Mencapai >75%

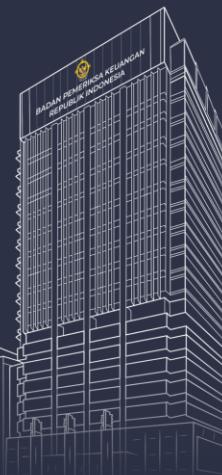




Transformasi Digital Pemeriksaan (Big Data)



Dukungan Pemda:
Pemberian akses
data *read-only*
secara lengkap.





Harapan & Komitmen Sinergi



Cross Cutting Issues

Membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait.



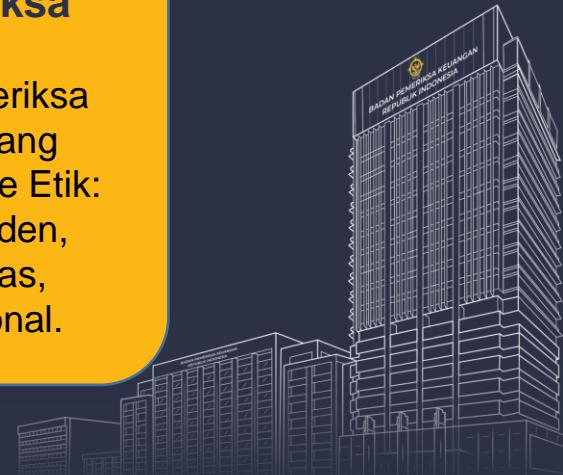
Pendekatan Pencegahan

BPK siap untuk memfasilitasi komunikasi, koordinasi dan *knowledge sharing*



Sikap Pemeriksa

Tim Pemeriksa memegang teguh Kode Etik: Independen, Integritas, Profesional.





Terima Kasih



@bpkriofficial



@bpkri



@bpk.ri



BPK RI Official



humasbpkri.official